

LAPORAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



**KANTOR RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN
NEGARA KELAS I PALU
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi Organisasi	2
C. Struktur Organisasi.....	3
D. Pengertian Tusi Dalam Struktur.....	4
E. Permasalahan dan Capaian Kinerja.....	4
A. Permasalahan	4
B. Capaian	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis	6
B. Perjanjian Kinerja	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	7
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	7
B. Realisasi Anggaran	7
BAB IV PENUTUP.....	10
A. Kesimpulan.....	10
B. Rencana Tindak Lanjut Capaian Kinerja	10

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Lakip Tahun Anggaran 2023(Triwulan I) dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 ini telah selesai disusun. Sasaran Kinerja Tahun Anggaran 2023 ini merupakan evaluasi dari Kinerja Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palu untuk Tahun Anggaran 2023.

Sementara itu penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah / tanggung jawab / kinerja dengan pihak yang memberikan amanah / tanggung jawab / kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Kedua Dokumen ini juga disusun sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) membutuhkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. *Output* yang diharapkan dengan diterbitkannya Lakip Tahun Anggaran 2023 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 ini, Sebagaimana diketahui Tugas Pokok Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) adalah Melakukan Penyimpanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara dan menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengadministrasian Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara;
2. Melakukan pemeliharaan dan mutasi Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;
3. Melakukan pengamanan dan pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara

Dengan tersusunnya Lakip Tahun Anggaran 2023 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan menjadi sumber informasi yang akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah Lakip Tahun Anggaran 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Tengah.



PALU, 15 Maret 2023
KEPALA,

USMAN, S.S.Sos

Nip. 19660705 199403 1 003

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Lakip Tahun Anggaran 2023 Rupbasan Kelas I Palu ini dimaksudkan untuk menyampaikan hasil-hasil kinerja selama tahun 2023. Pelaporan ini pula diharapkan mampu menjadi bukti pertanggungjawaban instansi kepada masyarakat luas untuk diketahui. Pertanggungjawaban ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan dalam rangka upaya menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Seiring dengan berjalannya sistem, Rupbasan Kelas I Palu telah menjalankan tujuan-tujuan mendasar yang telah diprogramkan. Tujuan-tujuan yang telah dicapai dan hendak ditingkatkan tersebut adalah:

1. Mewujudkan manajemen pembinaan dan perawatan Basan dan Baran yang baik;
2. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat luas; dan
3. Mewujudkan manajemen internal yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik atau yang biasa disebut *good governance* dalam suatu negara merupakan *issue* yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip *good governance*. Salah satu perwujudan *Good Governance*, pemerintah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya.

Hal ini disebabkan karena akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip-prinsip *good Governance*. *United Nations Development Program* (UNDP) mengajukan sembilan karakteristik *good governance* yang salah satunya adalah *accountability* (akuntabilitas). Ditambah lagi prinsip akuntabilitas juga merupakan salah satu dari tujuh asas penerapan *good governance* dalam acuan umum penerapan *good governance* pada sektor publik oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

B. Tugas dan Fungsi Organisasi

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palu disingkat RUPBASAN yang beralamat di jalan Kekentina No. 1 Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara yang berjarak sekitar \pm 20 Km dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah, yang sudah berdiri sejak tahun 2005, yang sebelumnya masih menempati kantor BKPMMD milik Pemerintah Daerah Kota Palu yang beralamat di Jalan Garuda. Kantor Rupbasan adalah tempat menyimpan dan memelihara :

1. Benda Sitaan Negara (BASAN) yaitu benda yang disita oleh Negara untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan agar terjamin keutuhan jenis dan mutunya.
2. Barang yang dirampas oleh dan untuk Negara (BARAN) berdasarkan keputusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan dirampas oleh Negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara :
 - Dimusnahkan
 - Dilelang untuk Negara
 - Disimpan di Rupbasan

Mengingat operasional Rupbasan Kelas I Palu telah berfungsi sebagaimana mestinya, maka dalam rangka penyempurnaan tugas pokok dan fungsi Rupbasan Palu sebagai salah satu upaya penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diamanahkan dalam Landasan Konstitusional UUD 1945 yang secara yuridis telah tertuang dalam KUHAP Pasal 44 ayat (1) bahwa benda sitaan / barang rampasan negara disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, dimana Rupbasan secara operasional telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

Tugas dan Fungsi Rupbasan Kelas I Palu antara lain:

1. Memberikan jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan Barang Bukti pada tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di sidang Pengadilan serta barang-barang yang dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan Pengadilan.
2. Peningkatan pelaksanaan dan pengelolaan Basan/Baran.
3. Peningkatan hubungan antar instansi terkait (aparatus penegak hukum) dalam rangka proses penegakan hukum.

TUGAS	FUNGSI
Melakukan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara	1. Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara 2. Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan negara 3. Melakukan pengamanan dan pengelolaan RUPBASAN 4. Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan

VISI

Mewujudkan masyarakat memperoleh status kepastian hukum dengan menjalin keutuhan, keselamatan, dan keamanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara.

MISI

- Meningkatkan sumber daya manusia
- Menumbuhkan sikap tanggung jawab pegawai terhadap tugas pokok dan fungsi
- Meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat
- Melaksanakan pengelolaan benda sitaan negara secara optimal
- Meningkatkan koordinasi dengan institusi penegak hukum

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan benda sitaan negara
- Melakukan peng-Administrasian benda sitaan dan barang rampasan negara
- Melakukan pengamanan dan pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara
- Melakukan urusan Tata Usaha

C. STRUKTUR ORGANISASI

Penyusunan ini merupakan bentuk peningkatan akuntabilitas dan perwujudan nyata visi dan misi yang telah disusun sedemikian rupa untuk dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, Rupbasan Kelas I Palu telah menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:M.04-PR.07.03 Tahun1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

1. Subseksi Administrasi dan Pemeliharaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, dimana Subseksi Administrasi dan Pemeliharaan melaksanakan tugas pengadministrasian yang terdiri dari penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, registrasi, mutasi dan pengeluaran benda sitaan dan barang rampasan negara, keadaan benda sitaan dan barang rampasan negara pada Rupbasan Kelas I Palu.
2. Subseksi Pengamanan dan Pengelolaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub seksi, dimana sub seksi Pengamanan dan Pengelolaan melaksanakan tugas ;
 - a. Pengamanan dipimpin oleh seorang Kepala Pengamanan dengan dibantu oleh regu pengamanan dilingkungan kantor Rupbasan dan Pengamanan terhadap benda sitaan dan

barang rampasan negara.

b. Pengelolaan melaksanakan kegiatan administrasi di bidang :

1. Kepegawaian

Jumlah Pegawai di Rupbasan Kelas I Palu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang.

2. Keuangan

- Melaksanakan kegiatan keuangan untuk kegiatan rutin Rupbasan yaitu melakukan pembayaran jasa tagihan telepon dan listrik.
- Mengajukan belanja pegawai (pembayaran gaji, lembur dan rapel)
- Membuat Laporan Keuangan tentang Anggaran Per Sub Bidang Satker / Bulan.

3. Petugas Tata Usaha, Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, tata persuratan dan kearsipan, Mengagendakan kegiatan Kepala Rupbasan, Mengklasifikasikan arsip dan dokumen Surat masuk dan Surat keluar, Mendistribusikan surat dinas yang berasal dari instansi lain setelah mendapat disposisi dari Kepala Rupbasan.

4. Pengamanan

- Tugasnya melaksanakan pengamanan terhadap Basan Baran dan seluruh lingkungan kantor Rupbasan.
- Petugas pengamanan dibagi menjadi 4 (empat) regu jaga:

Keputusan Menteri Kehakiman tersebut juga telah mengatur susunan organisasi Rupbasan Kelas I Palu,yang mana di dalamnya terdapat bidang-bidang kerja yang menyusun struktur internal Rupbasan Kelas I Palu. bidang-bidang tersebut terdiri atas:

1. Kepala Subseksi Pengamanan dan Pengelolaan

Persentase pencapaian target kinerja yang akuntabel serta pemenuhan standar dalam pelayanan masyarakatan bidang pengamanan dan pengelolaan di wilayah kerjanya.

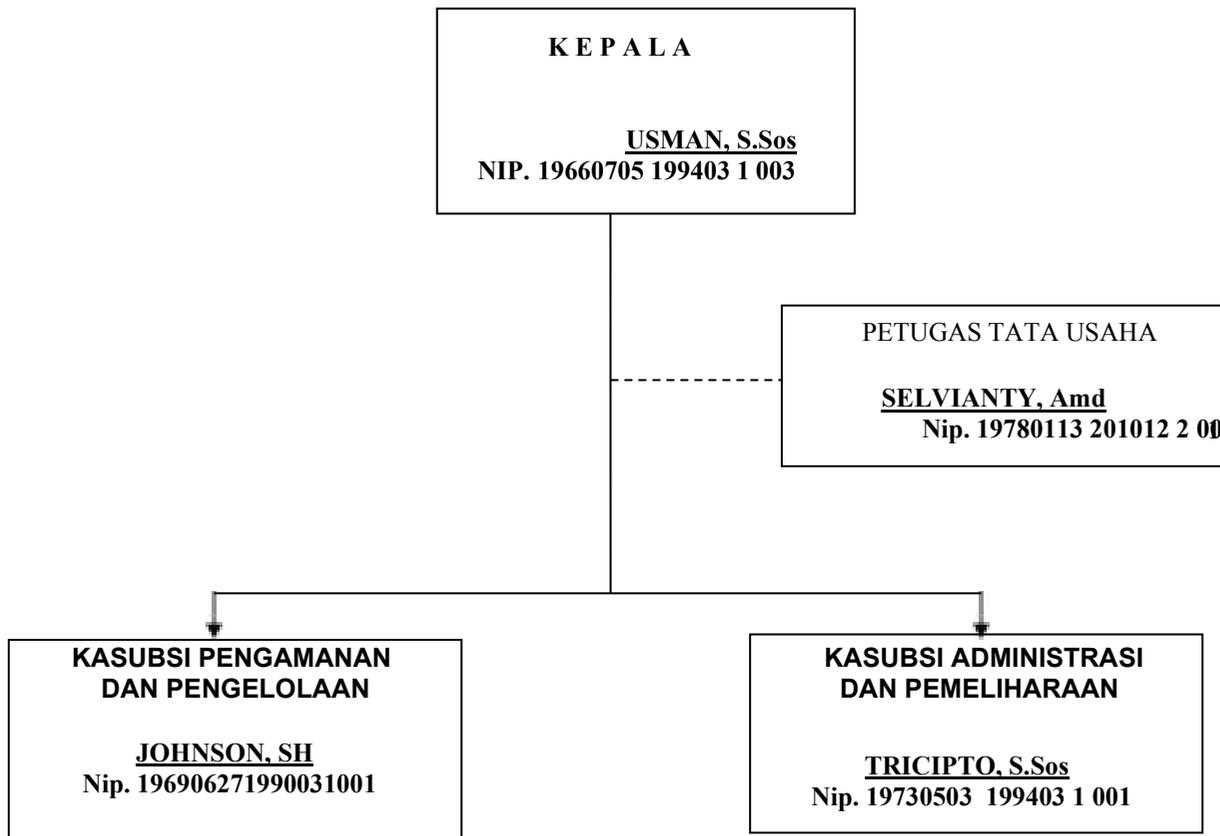
2. Kepala Subseksi Administrasi dan Pemeliharaan

Persentase pencapaian target kinerja dengan administrasi yang akuntabel serta pemenuhan standar dalam pelayanan masyarakatan bidang Pengadministrasian dan Pemeliharaan Basan dan Baran.

3. Petugas Tata Usaha

Petugas Tata Usaha pada Kantor Rupbasan Kelas I Palu tidak termasuk pada Jabatan Struktural yang dalam hal ini menangani Surat masuk dan keluar serta sebagai agendaris.

STRUKTUR ORGANISASI RUPBASAN KELAS I PALU



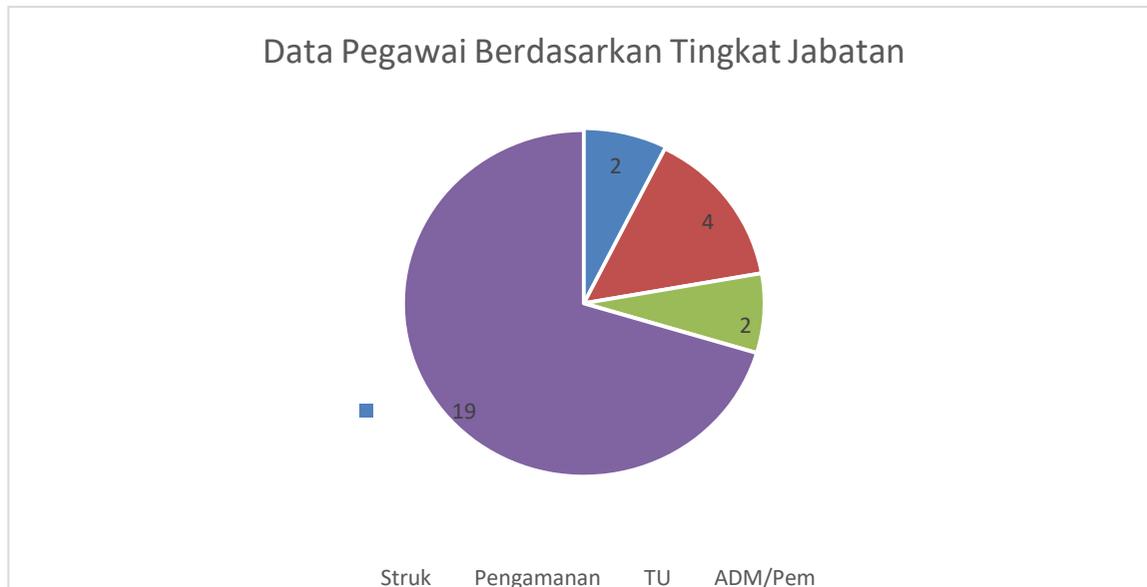
D. PENGERTIAN TUSI DALAM STRUKTUR

Rupbasan adalah tempat benda yang di sita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan dan didirikan pada setiap kabupaten atau kota. Didalam rupbasan ditempatkan benda yang harus di simpan untuk keperluan barang bukti dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang di nyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.

Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut. Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan atas permintaan jaksa secara tertulis. Pemusnahan barang rampasan dilakukan oleh jaksa dan disaksikan oleh kepala Rupbasan.

Dari fungsi kelembagaan Rupbasan merupakan pusat penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan Negara dari seluruh instansi di Indonesia. Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor : M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2010 tentang rencana strategis Kemenkumham Tahun 2010-2014 mengalami suatu kemajuan yang luar biasa dimana Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Kemenkumham terdapat Direktorat yang akan merumuskan serta melaksanakan kebijakan standardisasi dan memberikan bimbingan teknis di bidang pengelolaan Basan dan Baran yaitu Direktorat Pengelolaan Basan dan Baran.



E. PERMASALAHAN DAN CAPAIAN

A. Permasalahan

Masalah atau kendala yang dihadapi RUPBASAN Kelas I Palu dalam melakukan kinerja program dan kegiatan antara lain :

1. Kurangnya pengetahuan petugas penerimaan, penelitian, registrasi, penyimpanan dan perawatan Basan Baran Staf Administrasi dan Pemeliharaan;
2. Kewenangan pengelolaan basan baran yang kurang maksimal ,jadi Rupbasan terkesan merupakan tempat penyimpanan barang bekas / rusak;
3. Belum adanya aturan khusus bersama dengan instansi terkait yang menyangkut batas waktu penitipan Basan dan Baran di RUPBASAN;

4. Kurangnya Jumlah Pegawai sehingga banyak tugas-tugas yang di rangkap.
5. Sarana dan Prasarana Ruang yang masih kurang.
6. Kurangnya Petugas Jaga.

Perlu penambahan gudang basan baran,meningkatkan Rupbasan Kelas I Palu melayani Intansi penegak hukum , meliputi ;

- a. Polda Sulawesi Tengah
- b. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
- c. Kejaksaan Negeri Palu
- d. Kejaksaan Negeri Donggala
- e. Polres Donggala
- f. Polres Palu
- g. Bea & Cukai Pelabuhan Pantoloan
- h. PPNS DEPAR INDAKOP Kota Palu
- i. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
- j. Pengadilan Negeri Palu

B. Capaian

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mencari jalan keluar dari masalah yang di hadapi dalam proses penyelenggaraan kinerja program dan kegiatan RUPBASAN Kelas I Palu adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengatasi basan baran yang overload di gudang penyimpanan;
2. Senantiasa menyampaikan informasi mengenai komitmen dan aturan yang ada kepada aparat/intansi penegak hukum;
3. Mengupayakan kondisi gudang dan basan baran tetap rapi dan terpelihara dengan baik;
4. Melakukan penataan Basan dan Baran serta teknik strategi sirkulasi mutasi/keluar masuk basan baran untuk meminimalisir serta efektif tenaga.
5. Pelaporan kinerja belum tepat waktu. Hal ini disebabkan karena belum ada pegawai yang pernah mengikuti Bimtek atau Diklat pembuatan Laporan Kinerja (LKj)
6. Mengusulkan penambahan anggaran program publikasi di pagu alokasi untuk memperkuat kualitas dan kuantitas fungsi kehumasan
7. Membuat SOP penerimaan dan pengambilan basan baran;
8. Membuat mekanisme layanan informasi untuk pengambilan basan baran melalui banner-banner;

Adapun tabel permasalahan dan capaian Organisasi sebagai berikut :

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2023
<p style="text-align: center;">SUB SEKSI ADMINISTRASI DAN PEMELIHARAAN</p>	<p>Kurangnya SDM penunjang dalam kegiatan penilaian Basan Baran (memiliki keahlian khusus)</p> <p>Program SDP yang dikembangkan masih mendapat hambatan dan kendala, dimana ini adalah salah satu program yang harus mendapatkan prioritas karena menjadi salah satu prioritas kantor.</p>	<p>Menyelenggarakan kegiatan Workshop Penilaian basan baran di Rupbasan Kelas I Palu dengan mengundang narasumber dari Direktorat penilaian Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) KPKNL Palu.</p> <p>Mengajukan Kegiatan Pengembangan Aplikasi SDP bagi karyawan/ti untuk mengikuti kegiatan tersebut kepada pihak terkait..</p>	-
<p style="text-align: center;">SUB SEKSI PENGAMANAN DAN PENGELOLAAN</p>	<p>Kurangnya SDM dibidang Pengamanan.</p> <p>Minimnya sarana prasarana pengamanan</p>	<p>Mengajukan penambahan personil (petugas pengamanan) kepada pihak terkait</p> <p>Mengusulkan kpd pihak-pihak terkaitnamun sampai dengan saat ini belum direalisasikan</p>	-

C. Isu Strategis / Permasalahan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palu selama 1 Tahun Anggaran Tahun 2023, terdapat beberapa isu strategis/permasalahan organisasi yang dialami antara lain:

No	Isu Strategis/Kendala yang dihadapi	Solusi/Tindak Lanjut
	Kasubsi Pengamanan dan Pengelolaan	
1	Sumber Daya Manusia yang belum memadai dalam pelaksanaan Tugas	Peningkatan Kompetensi SDM dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi dengan melakukan bimbingan serta pelatihan teknis maupun fungsional
2	Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang secara signifikan sangat menghambat proses pelaksanaan tugas	Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana melalui usulan rencana kerja dan anggaran setiap tahun ke Kantor Wilayah Sulawesi Tengah dan Ke Sekretaris Jenderal Kemenkumham R.I.
3	Masih Kurangnya Petugas Jaga yang belum memadai dalam pelaksanaan Tugas	Permintaan Petugas Jaga setiap tahun anggaran ke Kanwil Sulawesi Tengah
	Kasubsi Administrasi dan Pemeliharaan	
1	Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia yang menunjang dalam Pengawasan Barang sitaan dan Barang Rampasan	Kompetensi SDM dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi dalam penerimaan Basan dan Baran
2	Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang secara signifikan sangat menghambat proses pelaksanaan tugas	Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana melalui usulan rencana kerja dan anggaran setiap tahun ke Kantor Wilayah Sulawesi Tengah dan Ke Sekretaris Jenderal Kemenkumham R.I.

1.4 Dasar Hukum

Yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rupbasan Kelas I Palu adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
11. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HM-01.PR.01.01 Tahun 2021.
12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Sistematika Laporan

KATA PENGANTAR : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Tahun 2023

RINGKASAN EKSEKUTIF : Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan dan sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023

Menjelaskan Visi, Misi, Dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Anggaran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Tahun 2023 berdasarkan dalam mencapai target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Tahun 2023.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Tahun 2023 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja tahun 2023

BAB. II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Dalam suatu organisasi perencanaan itu sangat penting karena di gunakan untuk mencapai tujuan suatu organisasi serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi karena tanpa suatu perencanaan fungsi suatu organisasi, pengontrolan, pengarahan tidak akan dapat berjalan.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	TARGET	
			2022	2023
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	Layanan Publik Lainnya	Pengelolaan Basan Baran	100%	9,17%
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN/Layanan Humas/Layanan Umum/Perkantoran	99,93%	28,46%
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	98,18%	-
	Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	100%	-
	Layanan Manajemen Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran/Pemantauan Evaluasi/Manajemen Keuangan	100%	-

Dengan melihat sasaran kerja untuk tahun 2023 terjadi peningkatan pada semua indicator. Penetapan kinerja dan rencana kerja serta anggaran Rupbasan Kelas I Palu disokong dari biaya APBN(DIPA) tahun anggaran 2023. Rincian rencana kinerja tersebut dipaparkan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	ANGGARAN	Realisasi 2023
Penyelenggaraan Pemasarakatan diWilayah	Layanan Publik Lainnya	1 Basan Baran	136.356.000	12.500.000
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12 Bulan	2.419.214.000	688.477.971
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	12 Bulan	9.081.000	0
	Layanan Manajemen SDM Internal	12 Bulan Layanan	85,935,000	0
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1 Basan Baran	22.460.000	0

Pada awal Tahun Layanan Publik lainnya dana yang sudah terserap pada Triwulan I untuk anggaran tersebut dari Rp. 136.356.000,- sudah terpakai sekitar 9.17% yaitu sebesar Rp. 12.500.000,- dan untuk Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan dana sebesar Rp. 2.419.214.000,- telah terpakai sebesar 28.46% atau sebesar Rp. 688.477.971,-

Perjanjian kinerja merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja, evaluasi kinerja aparatur dan pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Perjanjian kinerja tahun 2023 disusun mengacu kepada kedudukan, tugas, dan fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2020-2024. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI.

Dalam laporan kinerja juga menjelaskan realisasi capaian kinerja sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Dan selanjutnya pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target/sasaran kinerja dalam satuan persentase. Rumus pengukuran kinerja tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Laporan kinerja juga menyajikan gambaran alokasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran, dimana capaian realisasi anggaran diukur dalam satuan persentase dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Realisasi Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

Melalui pengukuran ini, maka dapat diketahui tingkat keberhasilan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palu Aitar dahn mencapai target/sasaran kinerjanya, Selaniutnya dilakukan suatu analisa terhadap faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mencapai target/sasaran kinerja tersebut. Perlu ditemukan solusi terhadap Faktor penghambat, sehingga laporan kinerja yang disusun dapat digunakan sebagai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palu secara berkelanjutan.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	2023
1	Meningkatnya Pelayanan Basan Baran	Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	70%	38,22%
2	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	70%	45,23%
3	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
		Nilai IKPA/ Nilai SMART	100	83,45%

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan

1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemasarakatan

Dalam rangka mengetahui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan dan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palu melaksanakan survey IKM secara berkala (setiap bulan) melalui pengumpulan dan pengolahan data hasil kuisioner / poin tingkat kepuasan. Laporan rekapitulasi hasil survey IKM pada tahun 2023 menunjukkan 85,24% klien merasa puas dengan layanan pemasarakatan.

2) Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasarakatan di wilayah sesuai standar

Dalam rangka mencapai sasaran ini, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palu menyediakan layanan informasi pemasarakatan melalui loket informasi. Petugas layanan informasi akan melayani mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB. pada hari Senin .s.d Jum'at, Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional tidak melayani tamu datang di Rupbasan.

Selain itu layanan informasi pemasarakatan kepada publik dapat dilayani secara online melalui SDP Pemasarakatan. Ditjen Pemasarakatan mengharuskan Satker melakukan pengisian data SDP pada aplikasi sms-getway setiap bulannya. Hal ini bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi pemasarakatan di masyarakat luas. Data terkait jumlah klien, informasi Basan, dan Baran dapat disajikan secara online kepada publik dengan mengakses [http://smlap.ditjenpas.go id/](http://smlap.ditjenpas.go.id/) . Data SDP Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palu menunjukkan adanya kepatuhan dalam mendukung pelayanan informasi data pemasarakatan yang uptodate.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,tujuan,misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palu merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Hukum dan HAM RI yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palu diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja (LKj) yang berpedoman pada peraturan yang berlaku. LKj Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palu tahun anggaran 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil atau belum terlaksana pada periode atau tahun tersebut sehingga dapat menjadi pedoman, acuan dan prioritas pada perjanjian kinerja pada tahun berikutnya.

Penjabaran Akuntabilitas Kinerja suatu instansi menunjukkan adanya keterbukaan informasi menyangkut manajemen internalnya. Untuk itu,berikut ini disajikan laporan akuntabilitas kinerja dan percepatan realisasi anggaran Rupbasan Kelas I Palu tahun anggaran 2023, ringkasan percepatan realisasi anggaran TA 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

Kegiatan :

No	Indikator Kinerja	Anggaran	Keterangan
1	Pelayanan Publik Lainnya -Inventarisasi Basan/Baran -Pemeliharaan Pemindahan Basan/Baran	Rp. 136.356.000,- Rp. 7.200.000,- Rp. 129.156.000,-	-
2	Layanan Dukungan Manajemen Internal - Layanan BMN - Layanan Humas - Layanan Umum - Layanan Perkantoran	Rp. 2.491.390.000,- Rp. 4.585.000,- Rp. 9.800.000,- Rp. 17.220.000,- Rp. 2.387.609.000,-	-
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal - Perangkat Pengolah Data/ Komunikasi	Rp. 9,081,000,- Rp. 9.081.000,-	-
4	Layanan Manajemen SDM Internal - Layanan Manajemen SDM	Rp. 85.935.000,- Rp. 85.935.000,-	-
5	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Reformasi Kinerja	Rp. 22.460.000,- Rp. 1.700.000,- Rp. 5.700.000,- Rp. 7.460.000,-	-

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palu telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LKJIP) tahun 2023 ini. Lakip Tahun Anggaran 2023 ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian kegiatan dan program Rupbasan Kelas I Palu.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas selama tahun 2023 pada Rupbasan Kelas I Palu telah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun, tetap tidak mampu dielakkan bahwa hal-hal internal dan mendasar masih menjadi kendala. Hambatan- hambatan tersebut berupa:

1. Kuantitas petugas yang sangat kurang;
2. Kualitas SDM yang kurang optimal;
3. Koordinasi disegala aspek yang belum dapat maksimal; dan
4. Sarana dan prasarana yang belum memadai.

B. RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, maka kiranya kantor wilayah mampu membantu dalam hal pengadaan. Bantuan-bantuan tersebut berupa:

1. Kemampuan tenaga administrasi pemeliharaan;
2. Kewenangan pengelolaan Basan Baran yang kurang maksimal ;
3. Belum adanya aturan khusus yang menyangkut batas waktu penitipan Basan Baran di Rupbasan;
4. Perlu penambahan gudang khusus untuk melayani + intansi penegak Hukum yang frekuensinya cukup tinggi.
5. Mengadakan pelatihan-pelatihan pasyarakat yang berkaitan dengan tugas langsung dilapangan demi meningkatkan kualitas petugas yang ada;
6. Mengadakan penambahan anggaran untuk sarana dan prasarana agar lebih memadai dari apa yang ada sekarang.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I PALU
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Usman
Jabatan : Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Budi Argap Situngkir
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 17 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan
Negara Kelas I Palu


Budi Argap Situngkir
NIP. 19751021 199803 1 001


Usman
NIP. 19660705 199403 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I PALU
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase Benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	80%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	85
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pengelolaan Basan Baran	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	80%
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 Unit

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 136.356.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 136.356.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.536.690.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 2.536.690.000,-

Palu, 17 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan
Negara Kelas I Palu



Budi Argap Situngkir
NIP. 19751021 199803 1 001



Osman
NIP. 19660705 199403 1 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I PALU
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Usman

Jabatan : Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palu

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palu, 17 Januari 2023

Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan
Negara Kelas I Palu

Kami

PASTI!

Usman

NIP. 19660705 199403 1 003

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Maret 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 632683 RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PALU

Hal 1 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	2,673,046,000	0	417,012,824	283,965,147	700,977,971	26.22 %	1,972,068,029
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	136,356,000	0	12,500,000	0	12,500,000	9.17 %	123,856,000
BF.5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	136,356,000	0	12,500,000	0	12,500,000	9.17 %	123,856,000
BAH Pelayanan Publik Lainnya	136,356,000	0	12,500,000	0	12,500,000	9.17 %	123,856,000
BAH.001 Pengelolaan Basan Baran	136,356,000	0	12,500,000	0	12,500,000	9.17 %	123,856,000
051 Inventarisasi Basan Baran	7,200,000	0	0	0	0	0.00 %	7,200,000
051.0A Penilaian dan Pengklasifikasian Basan Baran	7,200,000	0	0	0	0	0.00 %	7,200,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,200,000	0	0	0	0	0.00 %	7,200,000
000001. Transport Lokal	7,200,000	0	0	0	0	0.00 %	7,200,000
052 Pemeliharaan dan Pemindahan Basan Baran	129,156,000	0	12,500,000	0	12,500,000	9.68 %	116,656,000
052.0A Pemeliharaan Basan Baran Kategori Umum	129,156,000	0	12,500,000	0	12,500,000	9.68 %	116,656,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	124,000,000	0	12,500,000	0	12,500,000	10.08 %	111,500,000
000002. Kegiatan Pemeliharaan Basan Baran	124,000,000	0	12,500,000	0	12,500,000	10.08 %	111,500,000
522191 Belanja Jasa Lainnya	5,156,000	0	0	0	0	0.00 %	5,156,000
000003. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	5,156,000	0	0	0	0	0.00 %	5,156,000
WA Program Dukungan Manajemen	2,536,690,000	0	404,512,824	283,965,147	688,477,971	27.14 %	1,848,212,029
WA.6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	2,536,690,000	0	404,512,824	283,965,147	688,477,971	27.14 %	1,848,212,029
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,419,214,000	0	404,512,824	283,965,147	688,477,971	28.46 %	1,730,736,029
EBA.956 Layanan BMN	4,585,000	0	0	0	0	0.00 %	4,585,000
051 Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	1,865,000	0	0	0	0	0.00 %	1,865,000
051.0A Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	1,865,000	0	0	0	0	0.00 %	1,865,000
521211 Belanja Bahan	365,000	0	0	0	0	0.00 %	365,000
000004. Pengandaan, Perjilitan dan Pelaporan	365,000	0	0	0	0	0.00 %	365,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,500,000	0	0	0	0	0.00 %	1,500,000
000005. Transport Lokal	1,500,000	0	0	0	0	0.00 %	1,500,000
052 Administrasi Perigedaaan Barang dan Jasa	2,720,000	0	0	0	0	0.00 %	2,720,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Maret 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 632683 RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PALU

Hal 2 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
052.0A Administrasi Pengadaan Barjas	2,720,000	0	0	0	0	0 0.00 %	2,720,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	2,720,000	0	0	0	0	0 0.00 %	2,720,000
000006 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	2,720,000	0	0	0	0	0 0.00 %	2,720,000
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	9,800,000	0	0	0	0	0 0.00 %	9,800,000
051 Penyediaan Informasi Publik	400,000	0	0	0	0	0 0.00 %	400,000
051.0A Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	400,000	0	0	0	0	0 0.00 %	400,000
521211 Belanja Bahan	400,000	0	0	0	0	0 0.00 %	400,000
000083 Pengandaan, Perjilitan dan Pelaporan	400,000	0	0	0	0	0 0.00 %	400,000
052 Kerja Sama	9,400,000	0	0	0	0	0 0.00 %	9,400,000
052.0A Kerja Sama	9,400,000	0	0	0	0	0 0.00 %	9,400,000
521211 Belanja Bahan	400,000	0	0	0	0	0 0.00 %	400,000
000084 Pengandaan, Perjilitan dan Pelaporan	400,000	0	0	0	0	0 0.00 %	400,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,000,000	0	0	0	0	0 0.00 %	9,000,000
000085 Transport Lokal	9,000,000	0	0	0	0	0 0.00 %	9,000,000
EBA.962 Layanan Umum	17,220,000	0	0	0	0	0 0.00 %	17,220,000
051 Urusan Umum	17,220,000	0	0	0	0	0 0.00 %	17,220,000
051.0A Urusan Umum	17,220,000	0	0	0	0	0 0.00 %	17,220,000
521211 Belanja Bahan	8,220,000	0	0	0	0	0 0.00 %	8,220,000
000081 Spanduk, Banner, Leaflet	8,220,000	0	0	0	0	0 0.00 %	8,220,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,000,000	0	0	0	0	0 0.00 %	9,000,000
000082 Transport Lokal	9,000,000	0	0	0	0	0 0.00 %	9,000,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	2,387,609,000	0	404,512,824	283,965,147	688,477,971	28.84 %	1,699,131,029
001 Gaji dan Tunjangan	1,638,092,000	0	352,205,289	129,618,832	481,824,121	29.41 %	1,156,267,879
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan	1,631,720,000	0	352,205,289	129,618,832	481,824,121	29.53 %	1,149,895,879
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	1,076,499,000	0	269,311,350	89,721,950	359,033,300	33.35 %	717,465,700
000007 Belanja Gaji Pokok PNS	928,417,000	0	269,311,350	89,721,950	359,033,300	38.67 %	569,383,700
000008 Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	74,041,000	0	0	0	0	0 0.00 %	74,041,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Maret 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 632683 RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PALU

Hal 3 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000009. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	74,041,000	0	0	0	0	0 0.00 %	74,041,000
511119. Belanja Pembulatan Gaji PNS	17,000	0	4,406	1,379	5,785	34.03 %	11,215
000010. Belanja Pembulatan Gaji PNS	13,000	0	4,406	1,379	5,785	44.50 %	7,215
000011. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	2,000	0	0	0	0	0 0.00 %	2,000
000012. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	2,000	0	0	0	0	0 0.00 %	2,000
511121. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	103,659,000	0	17,823,895	6,322,325	24,146,220	23.29 %	79,512,780
000013. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	88,849,000	0	17,823,895	6,322,325	24,146,220	27.18 %	64,702,780
000014. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	7,405,000	0	0	0	0	0 0.00 %	7,405,000
000015. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	7,405,000	0	0	0	0	0 0.00 %	7,405,000
511122. Belanja Tunj. Anak PNS	22,894,000	0	5,151,298	1,774,838	6,926,136	30.25 %	15,967,864
000016. Belanja Tunj Anak PNS	19,622,000	0	5,151,298	1,774,838	6,926,136	35.30 %	12,695,864
000017. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1,636,000	0	0	0	0	0 0.00 %	1,636,000
000018. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1,636,000	0	0	0	0	0 0.00 %	1,636,000
511123. Belanja Tunj. Struktural PNS	12,600,000	0	3,780,000	1,260,000	5,040,000	40.00 %	7,560,000
000019. Belanja Tunjangan Struktural PNS	10,800,000	0	3,780,000	1,260,000	5,040,000	46.67 %	5,760,000
000020. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	900,000	0	0	0	0	0 0.00 %	900,000
000021. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	900,000	0	0	0	0	0 0.00 %	900,000
511124. Belanja Tunj. Fungsional PNS	84,840,000	0	19,465,000	6,425,000	25,890,000	30.52 %	58,950,000
000022. Belanja Tunjangan Fungsional PNS	72,720,000	0	19,465,000	6,425,000	25,890,000	35.60 %	46,830,000
000023. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	6,060,000	0	0	0	0	0 0.00 %	6,060,000
000024. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	6,060,000	0	0	0	0	0 0.00 %	6,060,000
511125. Belanja Tunj. PPh PNS	241,000	0	0	0	0	0 0.00 %	241,000
000025. Belanja Tunjangan PPh PNS	205,000	0	0	0	0	0 0.00 %	205,000
000026. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	18,000	0	0	0	0	0 0.00 %	18,000
000027. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	18,000	0	0	0	0	0 0.00 %	18,000
511126. Belanja Tunj. Beras PNS	71,458,000	0	16,439,340	5,576,340	22,015,680	30.81 %	49,442,320
000028. Belanja Tunj Beras PNS	71,458,000	0	16,439,340	5,576,340	22,015,680	30.81 %	49,442,320

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
 Satuan Kerja : 632683 RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PALU

Hal 4 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511129 Belanja Uang Makan PNS	259,512,000	0	20,230,000	18,537,000	38,767,000	14.94 %	220,745,000
000029. Belanja Uang Makan PNS Gol III	185,592,000	0	14,245,000	13,357,000	27,602,000	14.87 %	157,990,000
000030. Belanja Uang Makan Gol II	73,920,000	0	5,985,000	5,180,000	11,165,000	15.10 %	62,755,000
001.0B Uang Lembur	6,372,000	0	0	0	0	0.00 %	6,372,000
512211 Belanja Uang Lembur	6,372,000	0	0	0	0	0.00 %	6,372,000
000032. Uang Lembur Gol.III	3,060,000	0	0	0	0	0.00 %	3,060,000
000033. Uang Lembur Gol. II	900,000	0	0	0	0	0.00 %	900,000
000035. Uang Makan Lembur GOL.III	1,887,000	0	0	0	0	0.00 %	1,887,000
000036. Uang Makan Lembur Gol.II	525,000	0	0	0	0	0.00 %	525,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	749,517,000	0	62,307,535	154,346,315	206,653,850	27.57 %	542,863,150
002.0A Kesehatan Pegawai	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
000037. Pemenuhan Kebutuhan Obat-Obatan Pegawai	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
002.0B Pakaian Dinas	3,750,000	0	0	0	0	0.00 %	3,750,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	3,750,000	0	0	0	0	0.00 %	3,750,000
000038. Pengadaan Pakaian Dinas Pramubhakti	3,750,000	0	0	0	0	0.00 %	3,750,000
002.0C Pemeliharaan Gedung	314,224,000	0	0	145,700,000	145,700,000	46.37 %	168,524,000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	314,224,000	0	0	145,700,000	145,700,000	46.37 %	168,524,000
000040. Halaman	23,100,000	0	0	0	0	0.00 %	23,100,000
000098. Gedung Tidak Bertingkat	291,124,000	0	0	145,700,000	145,700,000	50.05 %	145,424,000
002.0D Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	55,326,000	0	1,500,000	0	1,500,000	2.71 %	53,826,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55,326,000	0	1,500,000	0	1,500,000	2.71 %	53,826,000
000041. PC/Laptop	8,760,000	0	0	0	0	0.00 %	8,760,000
000042. Finger Print	500,000	0	0	0	0	0.00 %	500,000
000043. Server	3,000,000	0	0	0	0	0.00 %	3,000,000
000044. Printer	6,900,000	0	1,500,000	0	1,500,000	21.74 %	5,400,000
000045. AC	610,000	0	0	0	0	0.00 %	610,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
 Satuan Kerja : 632683 RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PALU

Hal 5 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000047. Inventaris Kantor	8,640,000	0	0	0	0	0 0.00 %	8,640,000
000048. Instalasi Damkar	3,000,000	0	0	0	0	0 0.00 %	3,000,000
000049. Pompa Air	2,500,000	0	0	0	0	0 0.00 %	2,500,000
000050. CCTV	1,000,000	0	0	0	0	0 0.00 %	1,000,000
000051. Peralatan Dapur	12,830,000	0	0	0	0	0 0.00 %	12,830,000
000099. Genset	7,586,000	0	0	0	0	0 0.00 %	7,586,000
002.0E. Pemeliharaan Kendaraan	14,000,000	0	500,000	0	500,000	3.57 %	13,500,000
523121. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14,000,000	0	500,000	0	500,000	3.57 %	13,500,000
000053. Roda 2	4,000,000	0	500,000	0	500,000	12.50 %	3,500,000
000054. Forklift	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
002.0F. Lngganan Daya Jasa	52,800,000	0	6,210,415	3,076,315	9,286,730	17.59 %	43,513,270
522111. Belanja Lngganan Listrik	24,000,000	0	2,773,633	1,357,924	4,131,557	17.21 %	19,868,443
000055. Listrik	24,000,000	0	2,773,633	1,357,924	4,131,557	17.21 %	19,868,443
522112. Belanja Lngganan Telepon	28,200,000	0	3,436,782	1,718,391	5,155,173	18.28 %	23,044,827
000056. TeleponInternet	28,200,000	0	3,436,782	1,718,391	5,155,173	18.28 %	23,044,827
522113. Belanja Lngganan Air	600,000	0	0	0	0	0.00 %	600,000
000057. Air	600,000	0	0	0	0	0.00 %	600,000
002.0G. Jasa POS	5,144,000	0	1,042,000	0	1,042,000	20.26 %	4,102,000
521114. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,144,000	0	1,042,000	0	1,042,000	20.26 %	4,102,000
000058. Biaya POS	5,144,000	0	1,042,000	0	1,042,000	20.26 %	4,102,000
002.0H. Keperluan Perkantoran	162,890,000	0	22,840,000	0	22,840,000	14.02 %	140,050,000
521111. Belanja Keperluan Perkantoran	150,886,000	0	22,840,000	0	22,840,000	15.14 %	128,046,000
000059. Keperluan Pokok	48,016,000	0	7,600,000	0	7,600,000	15.83 %	40,416,000
000061. Pramubhakti/OB	83,820,000	0	0	0	0	0.00 %	83,820,000
000063. Pramubhakti/OB	19,050,000	0	15,240,000	0	15,240,000	80.00 %	3,810,000
521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	12,004,000	0	0	0	0	0.00 %	12,004,000
000064. ATK Rutn	12,004,000	0	0	0	0	0.00 %	12,004,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Maret 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 632683 RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PALU

Hal 6 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
002.01 Konsultasi dan Koordinasi	33,220,000	0	6,745,120	0	6,745,120	20.30 %	26,474,880
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33,220,000	0	6,745,120	0	6,745,120	20.30 %	26,474,880
000065. Tiket	20,000,000	0	3,185,120	0	3,185,120	15.93 %	16,814,880
000066. Penginapan	5,840,000	0	1,460,000	0	1,460,000	25.00 %	4,380,000
000067. Uang Harian	6,360,000	0	1,590,000	0	1,590,000	25.00 %	4,770,000
000068. Transport	1,020,000	0	510,000	0	510,000	50.00 %	510,000
002.0J Jamuan Tamu	5,043,000	0	210,000	0	210,000	4.16 %	4,833,000
521211 Belanja Bahan	5,043,000	0	210,000	0	210,000	4.16 %	4,833,000
000069. Jamuan Tamu	5,043,000	0	210,000	0	210,000	4.16 %	4,833,000
002.0K Honor Operasional Satuan Kerja	66,840,000	0	5,570,000	5,570,000	11,140,000	16.67 %	55,700,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	66,840,000	0	5,570,000	5,570,000	11,140,000	16.67 %	55,700,000
000070. KPA	27,360,000	0	2,280,000	2,280,000	4,560,000	16.67 %	22,800,000
000071. PPSPM	10,560,000	0	880,000	880,000	1,760,000	16.67 %	8,800,000
000072. Bendahara Pengeluaran	9,240,000	0	770,000	770,000	1,540,000	16.67 %	7,700,000
000073. Bendahara Pengeluaran Pembantu	6,840,000	0	570,000	570,000	1,140,000	16.67 %	5,700,000
000074. Pelugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)	6,000,000	0	500,000	500,000	1,000,000	16.67 %	5,000,000
000075. Staf Pengelola Keuangan	6,840,000	0	570,000	570,000	1,140,000	16.67 %	5,700,000
002.0L Penambah Daya Tahan Tubuh	26,280,000	0	7,690,000	0	7,690,000	29.26 %	18,590,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	26,280,000	0	7,690,000	0	7,690,000	29.26 %	18,590,000
000076. Penambah Daya Tahan Tubuh Pegawai	26,280,000	0	7,690,000	0	7,690,000	29.26 %	18,590,000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	9,081,000	0	0	0	0	0.00 %	9,081,000
EBB.951 Layanan Sarana Internal	9,081,000	0	0	0	0	0.00 %	9,081,000
051 Peningkat Pengolah Data dan Komunikasi	9,081,000	0	0	0	0	0.00 %	9,081,000
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	9,081,000	0	0	0	0	0.00 %	9,081,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9,081,000	0	0	0	0	0.00 %	9,081,000
000102. Video Conference	9,081,000	0	0	0	0	0.00 %	9,081,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Maret 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 632683 RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PALU

Hal 7 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	85,935,000	0	0	0	0	0 0.00 %	85,935,000
EBC.954 Layanan Manajemen SDM	85,935,000	0	0	0	0	0 0.00 %	85,935,000
051 Pembinaan Kepegawaian	85,935,000	0	0	0	0	0 0.00 %	85,935,000
051.0A Pembinaan Fisk Mental dan Disiplin (FMD)	85,935,000	0	0	0	0	0 0.00 %	85,935,000
521211 Belanja Bahan	1,785,000	0	0	0	0	0 0.00 %	1,785,000
000087. Kudapan	1,785,000	0	0	0	0	0 0.00 %	1,785,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	52,650,000	0	0	0	0	0 0.00 %	52,650,000
000088. Kegiatan Pembinaan FMD	52,650,000	0	0	0	0	0 0.00 %	52,650,000
522151 Belanja Jasa Profesi	31,500,000	0	0	0	0	0 0.00 %	31,500,000
000089. Honorarium Narasumber	31,500,000	0	0	0	0	0 0.00 %	31,500,000
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	22,460,000	0	0	0	0	0 0.00 %	22,460,000
EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,700,000	0	0	0	0	0 0.00 %	1,700,000
051 Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran	1,700,000	0	0	0	0	0 0.00 %	1,700,000
051.0A Penyusunan RKAKL	1,700,000	0	0	0	0	0 0.00 %	1,700,000
521211 Belanja Bahan	200,000	0	0	0	0	0 0.00 %	200,000
000090. Penggandaan, Perjidlan, dan Pelaporan	200,000	0	0	0	0	0 0.00 %	200,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,500,000	0	0	0	0	0 0.00 %	1,500,000
000091. Transport Lokal	1,500,000	0	0	0	0	0 0.00 %	1,500,000
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5,700,000	0	0	0	0	0 0.00 %	5,700,000
051 Penyusunan Laporan Kinerja	5,700,000	0	0	0	0	0 0.00 %	5,700,000
051.0A Penyusunan Laporan Kinerja	5,700,000	0	0	0	0	0 0.00 %	5,700,000
521211 Belanja Bahan	300,000	0	0	0	0	0 0.00 %	300,000
000096. Penggandaan, Perjidlan, dan Pelaporan	300,000	0	0	0	0	0 0.00 %	300,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,400,000	0	0	0	0	0 0.00 %	5,400,000
000097. Transport Lokal	5,400,000	0	0	0	0	0 0.00 %	5,400,000
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	7,600,000	0	0	0	0	0 0.00 %	7,600,000
051 Pengelolaan keuangan dari perbendaharaan	7,600,000	0	0	0	0	0 0.00 %	7,600,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN

Satuan Kerja : 632683 RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PALU

Hal 8 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051.0A Pengelola Sistem Akuntansi	7,600,000	0	0	0	0	0 0.00 %	7,600,000
521211 Belanja Bahan	400,000	0	0	0	0	0 0.00 %	400,000
000094. Penggandaan, Perjalanan, dan Pelaporan	400,000	0	0	0	0	0 0.00 %	400,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,200,000	0	0	0	0	0 0.00 %	7,200,000
000095. Transport Lokal	7,200,000	0	0	0	0	0 0.00 %	7,200,000
EBD 981 Layanan Reformasi Kinerja	7,460,000	0	0	0	0	0 0.00 %	7,460,000
051 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM)	7,460,000	0	0	0	0	0 0.00 %	7,460,000
051.0A Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM)	7,460,000	0	0	0	0	0 0.00 %	7,460,000
521211 Belanja Bahan	260,000	0	0	0	0	0 0.00 %	260,000
000092. Penggandaan	260,000	0	0	0	0	0 0.00 %	260,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,200,000	0	0	0	0	0 0.00 %	7,200,000
000093. Transport Lokal	7,200,000	0	0	0	0	0 0.00 %	7,200,000



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NOMOR : SP DIPA- 013.05.2.632683/2023

06.3489-8402-4090-6310



Revisi ke 01

Tanggal : 14 Februari 2023

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (013)	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi	: (05)	Ditjen Pemasyarakatan
3. Provinsi	: (18)	SULAWESI TENGAH
4. Kode/Nama Satker	: (632683)	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAAN NEGARA PALU
Sebesar	: Rp.	2.673.046.000 (DUA MILIAR ENAM RATUS TUJUH PULUH TIGA JUTA EMPAT PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	2.673.046.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN P A L U	(051) Rp.	2.673.046.000
-----------------	-----------	---------------

E. Pernyataan Syarat dan Keterangan (Disclaimer)

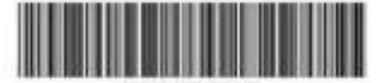
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga)
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Pelebaran Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan buku-buku yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022

A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NS
ISA RACHMATARWATA
NP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.05.2.632683/2023



Sekret : (00000) RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAAN NEGARA PALU

00	KETERIBAN DAN KEAMNAN	Rp.	2.673.046.800
00.03	PEMBERUAN HUKUM	Rp.	2.836.690.000
00.05	LEMBAGA PEMASYARAKATAN	Rp.	126.356.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.05.2.632683/2023



00.8409.4012.4000.1110

Satker : (632683) RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAH (REGARA PALU)

BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp	136.256.000
BF.5252	Penyenggaraan Pemerintahan di Wilayah	Rp	136.256.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp	2.536.690.000
WA.4231	Dukungan Manajemen dan Teknik Lainnya UPT Pemerintahan	Rp	2.536.690.000

DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA- 013.05.2.632683/2023

I A. INFORMASI KINERJA



00 5469 8402 4310 8712

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (06) DiJen Pemasyarakatan
 Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
 Kode/Nama Saker : (6205 03) RUMAH PENYIMPINAN BENDA SITAAAN NEGARA PALU

Halaman : I A. 1

Program	013.05.01	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	136.306.000
Kegiatan	5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	135.356.000
Indikator Kinerja Kegiatan	1-01	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	
	2-01	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan berprestasi	
	3-01	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terduga kualitas dan kuantitasnya	
	4-01	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melaksana pekerjaan di luar lembaga	
	5-01	Persentase menukarnya tahanan yang pemstayang	
	6-01	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada indikator penilaian keprabdian	
	7-01	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan Narapidana/Anak sesuai dengan standar	
	8-01	Persentase pengadilan yang diadukan/anjali sesuai standar	
	9-02	Persentase Anak yang memperoleh hak integral	
	10-02	Persentase Tahanan Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	
	11-02	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	
	12-02	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkualitas hukum tetap	
	13-02	Persentase gangguan kamlib yang dapat dicegah	
	14-02	Persentase menukarnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	
	15-02	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	
	16-02	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	
	17-02	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	
	18-02	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak priaku gangguan kamlib	
	19-02	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	
	20-02	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	
	21-02	persentase Anak yang memperoleh Hak Pengsuhun sesuai standar	
	22-04	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA-013.05.2.632683/2023

I A. INFORMASI KINERJA



03 4413 432 450 8318

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (06) Ditjen Pemasyarakatan
 Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
 Kode/Nama Saker : (520583) RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAAN NEGARA PALU

Halaman : I A. 2

Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah					
23.	04	Persetase Tahanan/Naraspidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat terfangani			
24.	04	Persetase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal			
25.	04	Persetase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas			
26.	05	Persetase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi			
27.	05	Persetase tahanan/naraspidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar			
28.	06	Persetase narapidana yang bekerja dan produktif			
29.	06	Persetase tahanan/naraspidana/anak membutuhkan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar			
30.	07	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi			
31.	07	Persetase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV/AIDS (tekan jumlah virusnya) dan TB Postif (berhasil sembuh)			
32.	08	Persetase perubahan kualitas hidup pecandu/peyalangguna/korban penyalanggunaan narkoba			
33.	13	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah			
34.	14	Persetase perubahan kualitas hidup pecandu/peyalangguna/korban penyalanggunaan narkoba			
35.	15	Persetase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum			
36.	16	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi			
37.	17	Persetase benda sitaan dan barang rampasan yang dikembalikan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap			
38.	18	Persetase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas			
39.	19	Persetase Men usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga			
40.	20	Persetase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal			
Kestikasi Rindan Output 1	: 522 BAH	Posyandu Posda Lainnya	1,00	layanan bidang, dokumen, Miliar Rp, ttn	136.255.000
Rindan Output	: 01 BAH.001	Pengelolaan Benda Baran	1,00	layanan	136.205.000
Program	: 013.05.001	Program Dukungan Manajemen			2.536.690.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA-013.05.2.632683/2023

I A. INFORMASI KINERJA



003403-6482-400-0310

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan
 Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
 Kode/Nama Saklar : (632683) RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAH NEGARA PALU

Halaman : I A. 3

Kepilahan	6231	Dukungin Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan			2.536.600.000
Indikator Kinerja Kegiatan	1.01	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)			
	2.01	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan laporan yang akuntabel tepat waktu			
	3.02	Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan)			
	4.02	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Keramah tanggahan			
	5.03	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)			
	6.03	Terperuhnya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan			
	7.04	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)			
	8.04	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu			
	9.06	Jumlah Layanan Perkantoran			
	10.02	Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas)			
	11.06	Jumlah Kendaraan Bermotor			
	12.06	Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan			
	13.07	Jumlah Perangkat Pengolah Tita dan Komunikasi			
	14.08	Jumlah Fasilitas dan Fasilitas Perkantoran			
	15.09	Jumlah Gedung/Bangunan			
	16.21	Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan			
	17.22	Jumlah Gedung/Bangunan			
Kategori Rincian Output	6231.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4.00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	2.419.214.000
Rincian Output	01	EBA.956 Layanan BMN	1.00	Layanan	4.995.000
	02	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	1.00	Layanan	9.800.000
	03	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	17.220.000
	04	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	2.387.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA-013.05.2.632683/2023

I A. INFORMASI KINERJA



03-8469-1402-4109-0110

Komponen Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (055) Ditjen Pemasyarakatan
 Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
 Kode/Name Sakel : (632683) RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PALU

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	2	6201.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,00	Unit, rd, Paket	9.081.000
Rincian Output	01	EBB 501	Layanan Sarana Internal	1,00	Unit	9.081.000
Klasifikasi Rincian Output	3	6201.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	59,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	55.935.000
Rincian Output	01	EBC 954	Layanan Manajemen SDM	59,00	Orang	55.935.000
Klasifikasi Rincian Output	4	6201.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	22.460.000
Rincian Output	01	EBD 952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	Dokumen	1.700.000
	02	EBD 953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	Dokumen	5.700.000
	03	EBD 955	Layanan Manajemen Keuangan	1,00	Dokumen	7.800.000
	04	EBD 961	Layanan Reformasi Kinerja	1,00	Dokumen	7.460.000

Jakarta, 30 November 2022
 Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ts
 Reynard S. Bonga
 NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.05.2.632683/2023**



05 9419 6412 4100 4318

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan
 Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
 Kode/Klasifikasi Saklar : (632683) RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAAN NEGARA PALU

Halaman : 1 | 1

1. Anggaran Tahun 2023		Rp.	2.573.046.090	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	Ekivalen Rupiah	0
1. Rumah Mumi	Rp.	2.573.046.090			(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0		0
2. PNBP	Rp.	0			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0		0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0		0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0			c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0				
5. Hibah Langsung	Rp.	0			d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0				
6. SSN/ PBS	Rp.	0			e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0				
2. Rincian Pinjaman / Hibah :					f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0				(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPPH per Tahun No. Register		PAGU TAHUN MI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp. LH	Rp. Lok. Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPPH : Nasabah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.05.2.632683/2023**



03-2455-6402-4555-6711

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, RI
 Unit Organisasi : (05) Dirjen Penayorakatan
 Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
 Kode/Nama Satker : (632683) RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAAN NEGARA PALU
 Kecamatan : (KD)

Halaman : II, 1
(dari 10 halaman)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA					LOKASI KPPN	CARA PENARKAN REGISTER	
		PEGAWAI (54)	BARANG (52)	MODAL (53)	BANTUAN SOSIAL (57)	LAIN-LAIN (58)			JUMLAH SELURUH (5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
632683	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAAN NEGARA PALU	1.638.092	1.025.873	9.081	-	-	2.673.046		
013.05.BF	Program Penagakan dan Pelayanan Hukum	-	136.266	-	-	-	136.266		
0202	Penyelenggaraan Pemasayarakatan di Wilayah	-	136.266	-	-	-	136.266		
0202.BA	Pelayanan Publik Lainnya	-	136.266	-	-	-	136.266	18-51	
	(18-51 SULAWESI TENGAH / KOTA PALU)								
01	RM	-	136.266	-	-	-	136.266	051	
013.05.WA	Program Dukungan Manajemen	1.638.092	889.517	9.081	-	-	2.536.690		
0201	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasayarakatan	1.638.092	889.517	9.081	-	-	2.536.690		
0201.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.638.092	781.122	-	-	-	2.419.214	18-51	
	(18-51 SULAWESI TENGAH / KOTA PALU)								
01	RM	1.638.092	781.122	-	-	-	2.419.214	051	
0201.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	9.081	-	-	9.081	18-51	
	(18-51 SULAWESI TENGAH / KOTA PALU)								
01	RM	-	-	9.081	-	-	9.081	051	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.05.2.632683/2023**



05.0605.003-4903-6102

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan
 Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
 Kode/Nama Subur : (632683) RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAIN NEGARA PALU
 Kawatangan : (KD)

Halaman : 8. 2
(dari 8 halaman)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENYARIFAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6231.EBO	Layanan Manajemen SDM Internal (18.51 SULAWESI TENGAH / KOTA PALU)	-	85.930	-	-	-	85.930	18.51	
01	RM	-	85.930	-	-	-	85.930	051	
6231.EBO	Layanan Manajemen Kinerja Internal (18.51 SULAWESI TENGAH / KOTA PALU)	-	22.460	-	-	-	22.460	18.51	
01	RM	-	22.460	-	-	-	22.460	051	
JUMLAH		1.638.892	1.826.873	9.081	-	-	2.673.046		

Jakarta, 30 November 2023
 Direktur Jenderal Pemasyarakatan

RI
 Reynhard Silonga
 NRP 62050332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA-013.05.2.632683/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



03.0009-5402-4000-8308

Kemendagri/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Dipen Pemasyarakatan
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
Kode/Instansi Subter : (632683) RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAAN NEGARA PALU

Halaman : 18.1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	632683	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAAN NEGARA PALU													
		RENCANA PENARIKAN DANA	210.215	188.712	343.125	317.538	294.226	199.542	488.298	218.198	183.148	100.278	101.188	81.701	2.873.048
		BELANJA PEGAWAI	213.628	138.377	138.583	385.568	135.110	140.182	284.815	134.370	125.242	44.338	37.068	640	1.838.082
		BELANJA BARANG	20.687	38.335	165.642	51.967	128.188	58.360	202.342	83.588	37.868	58.488	64.114	81.028	1.025.877
		BELANJA MODAL	0	0	8.898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.898
	013.05.BF.5052	Pengelolaan Pemasyarakatan di Wilayah	7.300	5.000	5.900	9.920	10.480	14.800	10.300	18.300	10.300	13.000	10.300	24.240	136.368
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	7.300	5.000	5.900	9.920	10.480	14.800	10.300	18.300	10.300	13.000	10.300	24.240	136.368
	013.05.WA.6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	232.815	181.712	338.125	307.218	248.803	184.742	468.023	207.828	152.815	87.748	90.847	57.461	2.736.680
		81 BELANJA PEGAWAI	213.628	138.377	138.583	385.568	135.110	140.182	284.815	134.370	125.242	44.338	37.068	640	1.838.082
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	18.187	23.335	160.642	41.948	112.688	44.520	182.042	73.290	27.514	43.438	53.761	86.810	880.817
		53 BELANJA MODAL	0	0	8.898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.898
		PERKIRAAN PENERIMAAN	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	5.988
		-ITBIP (425331)	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	5.988

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

/s/
Reynhard Sitonga
NRP 67050332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.05.2.632683/2023
IV A. B L O K I R**



00:0465-8473-4:000-0310

Kementerian Negara/Lembaga : [01] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [00] Ditjen Pemasaran
Provinsi : [18] SULAWESI TENGAH
Kode dan Nama Saklar : [632683] RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAAN NEGARA PALU

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Pemasaran

M.
Reynhard Siloberga
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.05.2.632683/2023
IV B. CATATAN**



00 64054402-40004310

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasaran
Provinsi : [19] SULAWESI TENGAH
Kode dan Nama Saklar : [632683] RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAAN NEGARA PALU

Halaman : IV B. 1
(dari ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Pemasaran

Dr.
Reynard Silonga
NRP 67090332



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH

Jln. Dewi Sartika No. 23 Palu 94133

Telephone Nomor (0451) 482353, Faksimili Nomor (0451) 481205

Laman: <http://suliteng.kemerkumham.go.id>, Email: kanwil.suliteng@kemerkumham.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA
KANTOR RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I PALU

0 1 3 - 0 5 - 1 8 0 0 - 6 3 2 6 8 3 - 0 0 0 - K D

Nomor : W24.PB.05.04 - 266 Tahun 2023

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : I Ketut Sebeldi, S.E.
NIP : 198701102006041001
Jabatan : Pengelola SimakBMN Wilayah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pembantu Pengguna Barang Wilayah Sulawesi Tengah Kementerian Hukum dan HAM untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

II. Nama : Takwin
NIP : 198409112010121002
Jabatan : Pengelola SimakBMN Satker

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pembantu Pengguna Barang (UAKPB) pada Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palu untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palu dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan yang disusun oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palu dengan Laporan yang disusun oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Wilayah (UAKPBW) Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah untuk Periode Tahunan Tahun Anggaran 2022 dengan hasil sebagai berikut:

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN :

No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2022		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	POSISI BMN DI NERACA	15.368.912.648	(198.356.207)	15.170.556.441
A	ASET LANCAR	955.000	(805.000)	150.000
1	Persediaan	955.000	(805.000)	150.000
B	ASET TETAP	15.367.957.648	(197.551.207)	15.170.406.441
1	Tanah	8.262.177.000	-	8.262.177.000
2	Peralatan dan Mesin	1.403.174.040	(101.821.250)	1.301.352.790
3	Gedung dan Bangunan	7.198.003.396	-	7.198.003.396
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	45.267.566	-	45.267.566
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.540.664.354)	(95.729.957)	(1.636.394.311)
C	ASET LAINNYA	-	-	-
1	Aset Tidak Berwujud	-	-	-
2	Aset Lain-lain (Aset Yg Dihentikan)	28.241.800	200.000.000	228.241.800
3	Kerjasama Dengan Pihak ke Tiga	-	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(28.241.800)	(200.000.000)	(228.241.800)
II	BMN NON NERACA	1.245.543	(768.435)	477.108
A	EKSTRAKOMPTABEL	1.245.543	(768.435)	477.108
1	BMN Ekstrakomptabel	2.146.870	-	2.146.870
2	Akumulasi Penyusutan Ekstrakomptabel	(901.327)	(768.435)	(1.669.762)
B	BPYBDS	-	-	-
C	BARANG HILANG	-	-	-
D	BARANG RUSAK BERAT	-	-	-
	Total (I+II)	15.370.158.191	(199.124.642)	15.171.033.549

Rincian terlampir



- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKPP disajikan dalam lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP Periode Tahunan Tahun Anggaran 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua


Takwin

NIP. 198409112010121002

Pihak Pertama


Ketut Sebeli, S.E.

NIP. 198701102006041001

Mengetahui :

Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN



Dyah Ayu Puspitasari, S.E.

NIP. 198612272009122004

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA****KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH**

Jln. Dewi Sartika No. 23 Palu 94123

Telephone Nomor (0451) 482353, Faksimili Nomor (0451) 481205

Laman: <http://ulteng.kemerkumham.go.id>, Email: kanwil_sulteng@kemerkumham.go.id

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN
Pada KANTOR RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I PALU
Periode Tahunan Tahun Anggaran 2022
Nomor : W24.PB.05.04 - 266 Tahun 2023

I. REKONSILIASI PENGELOLAAN BMN**a. Pemutakhiran Status Penggunaan**

No	Uraian	Belum Ditetapkan Status Penggunaan		Sudah Ditetapkan Status Penggunaan		
		Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	Upload SIMAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	-	-	1	8.262.177.000	8.262.177.000
2	Peralatan dan Mesin	-	-	202	1.531.741.460	1.531.741.460
3	Gedung dan Bangunan	-	-	15	7.198.003.396	7.198.003.396
4	Jalan	-	-	-	-	-
5	Irigasi	-	-	-	-	-
6	Jaringan	-	-	-	-	-
7	Aset Tetap Lainnya	-	-	6	45.267.566	45.267.566
JUMLAH		-	-	6	17.037.189.422	17.037.189.422

b. Pengelolaan BMN

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahtanganan	Penghapusan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang	-	-	-	-	-
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	-	-	-	1	1
3	Dalam proses Pengelola Barang	-	-	-	-	-
4	Selesai di Pengelola Barang	-	-	-	-	-
	a. Dikembalikan	-	-	-	-	-
	b. Ditolak	-	-	-	-	-
	c. Disetujui	-	-	-	-	-
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna/Kuasa Pengguna Barang	-	-	-	-	-
6	Telah diterbitkan SK dari Pengguna Barang	-	-	-	-	-
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	-	-	-	-	-
8	Selesai serah terima	-	-	-	-	-
9	Gagal/batal proses	-	-	-	-	-

Ket: diisi dengan jumlah usulan pengelolaan BMN

II. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN

- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengelolaan BMN Periode Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2022 adalah 5.987.388 dengan rincian sebagai berikut.

1. Sewa Aset Tetap	Rp.	5.987.388
2. Penjualan Aset/Bongkaran	Rp.	-
3. Pendapatan Lainnya	Rp.	-

III. INFORMASI PENTING LAINNYA (PENGUNGKAPAN LAINNYA)

Informasi Penting Lainnya (Pengungkapan Lainnya) Periode Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2022 pada Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palu adalah sebagai berikut.

- Terdapat BMN berupa 3 unit sepeda motor yang telah dilakukan penjualan secara lelang pada Semester II Tahun 2018 sampai sekarang belum keluar Surat persetujuan penghapusan dari SEKJEN

NILAI LAPORAN BARANG DAN LAPORAN KEUANGAN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2022

Perkiraan Neraca		Laporan Barang	Laporan Keuangan
Kode	Uraian		
1	2	3	4
	Posisi BMN di Neraca	15.170.556.441	15.170.556.441
	Aset Lancar	150.000	150.000
	Persediaan	150.000	150.000
	Aset Tetap	15.170.406.441	15.170.406.441
	Tanah	8.262.177.000	8.262.177.000
	Peralatan dan Mesin	1.301.352.790	1.301.352.790
	Akumulasi Penyusutan	(1.039.607.421)	(1.039.607.421)
	Gedung dan Bangunan	7.198.003.396	7.198.003.396
	Akumulasi Penyusutan	(596.786.890)	(596.786.890)
	Jalan dan Jembatan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	-	-
	Irigasi	-	-
	Akumulasi Penyusutan	-	-
	Jaringan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	-	-
	Aset Tetap dalam Renovasi	-	-
	Aset Tetap Lainnya	45.267.566	45.267.566
	Akumulasi Penyusutan	-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
	Aset Lainnya	-	-
	Hak Cipta	-	-
	Software	-	-
	Lisensi	-	-
	Hasil Kajian/Penelitian	-	-
	Aset Tak Berwujud Lainnya	-	-
	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan	228.241.800	228.241.800
	Akumulasi Penyusutan	(228.241.800)	(228.241.800)
	BMN Non Neraca	477.108	
	Ekstrakomptabel	477.108	
	BMN Ekstrakomptabel	2.146.870	
	Akumulasi Penyusutan	(1.669.762)	
	Barang Hilang	-	
	Barang Rusak Berat	-	
	TOTAL (H-II)	15.171.033.549	15.170.556.441